

**TATA KELOLA BANTUAN LANGSUNG TUNAI: PERSPEKTIF
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK**

Passya Stefanni Djada Tiri¹, Emanuel Rivan Ati², Irwanto Kabobu³, Selvy Julia
Nubatonis⁴, Mefri Jelita Ndolu Nassa⁵, Tania Alexandria Pandhu⁶

Program Studi Administrasi Negara,

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Universitas Nusa Cendana

2026

email: djadatiryfanny@gmail.com

Abstract

Direct Cash Assistance (BLT/Bantuan Langsung Tunai) is one of the social protection policy instruments that plays an important role in helping poor communities and vulnerable groups meet their basic needs. The implementation of BLT requires good governance to ensure targeting accuracy, program effectiveness, and accountable budget utilization. Transparency and accountability are the two main principles that determine the quality of social assistance governance within the framework of good governance. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in BLT governance, identify the various challenges encountered, and formulate a governance model relevant to the development of digital transformation. The research method employs a descriptive qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR). Data sources were obtained from scientific articles indexed in Google Scholar, Garuda, and SINTA over the period 2020-2025. The literature selection process was carried out through the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) stages, while data analysis employed thematic analysis and narrative synthesis. The findings indicate that transparency contributes to increased information disclosure, public trust, and community oversight. Accountability plays a role in strengthening administrative responsibility, reporting effectiveness, and the legitimacy of social assistance policies. The main challenges in BLT governance include inaccurate beneficiary data, limited bureaucratic capacity, the digital divide, and low levels of community participation. The novelty of this research lies in the development of the Transparent and Accountable Cash Transfer Governance (TACTG) model, which integrates information transparency, administrative accountability, service digitalization, community participation, multi-actor oversight, and continuous evaluation as an adaptive, transparent, and accountable BLT governance framework.

Keywords: *Direct Cash Assistance¹, Transparency², Public Accountability³, Government Governance⁴, Good Governance⁵.*

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu instrumen kebijakan perlindungan sosial yang berperan penting dalam membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan memenuhi kebutuhan dasar. Pelaksanaan BLT memerlukan tata kelola yang baik guna menjamin ketepatan sasaran, efektivitas program, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama yang menentukan kualitas tata kelola bantuan sosial dalam kerangka good governance. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BLT, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan model tata kelola yang relevan dengan perkembangan transformasi digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan *Systematic Literature Review* (SLR). Sumber data diperoleh dari artikel ilmiah yang terindeks pada *Google Scholar*, *Garuda*, dan *SINTA* selama periode 2020-2025. Proses seleksi literatur dilakukan melalui tahapan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)*, sedangkan analisis data menggunakan analisis tematik dan sintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berkontribusi terhadap peningkatan keterbukaan informasi, kepercayaan publik, dan pengawasan masyarakat. Akuntabilitas berperan dalam memperkuat pertanggungjawaban administrasi, efektivitas pelaporan, serta legitimasi kebijakan bantuan sosial. Tantangan utama tata kelola BLT meliputi ketidakakuratan data penerima manfaat, keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan digital, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Novelty penelitian terletak pada pengembangan model *Transparent and Accountable Cash Transfer Governance (TACTG)* yang mengintegrasikan transparansi informasi, akuntabilitas administratif, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, pengawasan multiaktor, dan evaluasi berkelanjutan sebagai kerangka tata kelola BLT yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci; Bantuan Langsung Tunai¹, Transparansi², Akuntabilitas Publik³, Tata Kelola Pemerintahan⁴, *Good Governance*⁵.

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu instrumen kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar (Novianti et al., 2026). Program ini menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi dampak kemiskinan, menjaga daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, terutama pada situasi

krisis dan ketidakpastian ekonomi. Implementasi BLT berkembang secara signifikan dalam berbagai sektor kebijakan sosial, khususnya sejak meningkatnya kebutuhan intervensi negara terhadap kelompok masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi (Fauzia & Purnawati, 2025). Keberadaan BLT menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui distribusi bantuan yang lebih cepat dan langsung kepada penerima manfaat.

Pelaksanaan BLT menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Ketepatan sasaran penerima bantuan masih menjadi isu yang sering ditemukan dalam berbagai daerah. Data penerima yang tidak mutakhir, tumpang tindih penerima bantuan, keterbatasan validasi data, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi program menjadi permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan BLT (Ilma et al., 2026). Persoalan lain muncul dalam bentuk kurang optimalnya mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BLT tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan yang disalurkan, melainkan juga oleh kualitas tata kelola yang diterapkan dalam setiap tahapan program (Siregar, 2025a).

Perspektif tata kelola pemerintahan menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Rahmawati & Tjenreng, 2025). Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan

masyarakat memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan, mekanisme penyaluran bantuan, kriteria penerima, serta penggunaan anggaran publik.

Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas, kebijakan, dan penggunaan sumber daya kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan (Resmadiktia et al., 2023). Penerapan kedua prinsip tersebut berkontribusi terhadap peningkatan legitimasi kebijakan, penguatan kepercayaan publik, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial.

Kajian mengenai BLT telah berkembang dalam berbagai perspektif akademik. Sebagian besar penelitian berfokus pada efektivitas program, dampak bantuan terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pemulihan ekonomi rumah tangga penerima manfaat (Riyanto, 2025). Kajian yang menyoroti transparansi dan akuntabilitas umumnya dilakukan dalam konteks tertentu, seperti evaluasi kinerja pemerintah desa, pengelolaan BLT Dana Desa, atau analisis implementasi kebijakan bantuan sosial pada wilayah tertentu (Riyanto, 2025). Temuan-temuan

tersebut menghasilkan pemahaman yang beragam mengenai praktik tata kelola BLT di Indonesia. Karakteristik penelitian yang tersebar pada berbagai lokasi, periode, dan pendekatan metodologis menyebabkan belum terbentuknya sintesis pengetahuan yang komprehensif mengenai pola transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BLT.

Kesenjangan penelitian terlihat pada terbatasnya studi yang mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) (Lame, 2019). Kajian yang tersedia lebih banyak bersifat parsial dan berorientasi pada studi kasus tertentu. Sintesis sistematis terhadap berbagai penelitian yang membahas transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BLT masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan belum teridentifikasinya pola umum, tantangan utama, faktor pendukung, serta arah pengembangan tata kelola BLT yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik modern.

Perkembangan transformasi digital dalam sektor pemerintahan menghadirkan dimensi baru dalam

pengelolaan bantuan sosial. Pemanfaatan sistem informasi, digitalisasi data penerima, integrasi basis data kependudukan, serta penggunaan platform elektronik dalam proses penyaluran bantuan berpotensi meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas (Setiawan & Soraya, 2025). Partisipasi masyarakat melalui media digital juga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengawasan publik terhadap implementasi BLT. Realitas tersebut menunjukkan perlunya kerangka tata kelola yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi juga mengakomodasi perkembangan teknologi dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial.

Fokus penelitian ini terletak pada upaya menyusun sintesis konseptual mengenai hubungan antara transparansi, akuntabilitas, digitalisasi pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola BLT melalui pendekatan *Systematic Literature Review*. Penelitian ini tidak hanya memetakan perkembangan kajian BLT selama periode 2020-2025, tetapi juga mengidentifikasi pola-pola tata kelola yang berkontribusi terhadap keberhasilan maupun hambatan implementasi program bantuan sosial. Kontribusi konseptual penelitian

diwujudkan melalui pengembangan model *Transparent and Accountable Cash Transfer Governance* (TACTG) yang menempatkan transparansi informasi, akuntabilitas administratif, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, pengawasan multiaktor, dan evaluasi berkelanjutan sebagai elemen utama tata kelola BLT yang efektif (Suriadi, 2025). Model tersebut diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan kebijakan bantuan sosial yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel pada masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, mengidentifikasi berbagai tantangan yang memengaruhi pelaksanaan program, serta merumuskan model tata kelola BLT yang relevan dengan prinsip good governance dan perkembangan transformasi digital dalam administrasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai

penelitian yang membahas tata kelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari perspektif transparansi dan akuntabilitas publik (Nightingale, 2009). Pendekatan SLR dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, tren kajian, kesenjangan penelitian, serta berbagai temuan yang berkaitan dengan implementasi tata kelola BLT di Indonesia. Proses penelitian mengacu pada tahapan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang meliputi identifikasi (*identification*), penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan penentuan artikel akhir (*included studies*) (Riadi, 2026). Penerapan tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap artikel yang dianalisis memiliki relevansi dan kualitas akademik yang sesuai dengan fokus penelitian.

Sumber data penelitian diperoleh dari database Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan SINTA (*Science and Technology Index*) (Widianto et al., 2025). Pemilihan ketiga database tersebut didasarkan pada cakupan publikasi ilmiah yang luas serta kredibilitasnya dalam menyediakan artikel yang berkaitan dengan administrasi

publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan bantuan sosial. Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci “Bantuan Langsung Tunai”, “BLT”, “BLT Dana Desa”, “transparansi”, “akuntabilitas publik”, “*good governance*”, “tata kelola pemerintahan”, dan “bantuan sosial”. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2025, memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, tersedia dalam bentuk full text, serta terindeks pada salah satu database yang digunakan. Artikel yang tidak relevan dengan fokus penelitian, tidak tersedia secara lengkap, atau merupakan publikasi ganda dikeluarkan dari proses analisis.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dan sintesis naratif (*narrative synthesis*). Proses analisis diawali dengan ekstraksi data yang meliputi identitas penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, serta temuan utama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BLT. Temuan-temuan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu transparansi informasi, akuntabilitas administrasi, partisipasi masyarakat, digitalisasi pelayanan,

pengawasan publik, dan efektivitas pelaksanaan BLT. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil penelitian dari berbagai artikel yang berasal dari *Google Scholar*, *Garuda*, dan *SINTA*. Hasil sintesis digunakan untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola tata kelola BLT serta merumuskan model konseptual yang mengintegrasikan transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Tren Penelitian Tata Kelola BLT di Indonesia Periode 2020–2025

Kajian mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) mengalami peningkatan sejak pandemi *Covid-19* dan berlanjut pada masa pemulihan sosial-ekonomi. Fokus penelitian pada aspek transparansi dan akuntabilitas juga mengalami perkembangan yang signifikan karena kedua aspek tersebut dianggap sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang berkualitas (Matin et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi

masyarakat, dan pengawasan memiliki hubungan yang kuat dengan keberhasilan pengelolaan dana publik dan pencapaian prinsip *good governance*.

Karakteristik tersebut menghasilkan temuan yang beragam sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kapasitas kelembagaan masing-masing daerah (Ishak & Hos, 2025). Keterbatasan tersebut menyebabkan belum terbentuknya sintesis konseptual yang mampu menjelaskan pola umum tata kelola BLT secara nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang pengembangan penelitian yang mengintegrasikan berbagai hasil penelitian ke dalam kerangka tata kelola yang lebih komprehensif.

Mengidentifikasi keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, dan pengawasan publik sebagai satu kesatuan sistem tata kelola bantuan sosial. Pendekatan tersebut menghasilkan perspektif yang lebih luas dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji setiap variabel secara terpisah.

B. Transparansi dalam Tata Kelola Bantuan Langsung Tunai

Transparansi merupakan prinsip yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai proses pendataan, penetapan penerima manfaat, mekanisme penyaluran, serta penggunaan anggaran BLT. Keterbukaan informasi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Informasi yang mudah diakses mampu mengurangi ketidakpastian, mencegah munculnya konflik sosial, serta memperkuat legitimasi kebijakan bantuan sosial (Irawan et al., 2025).

Praktik transparansi dalam pengelolaan BLT umumnya diwujudkan melalui publikasi daftar penerima manfaat, penyampaian informasi dalam forum musyawarah desa, pemasangan papan informasi, serta penyebarluasan informasi melalui media digital (Putri & Khasna, 2025). Tingkat keterbukaan yang tinggi memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial terhadap proses penyaluran bantuan. Mekanisme tersebut berkontribusi dalam mengurangi potensi penyimpangan dan kesalahan administrasi.

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan dimensi baru berupa transparansi digital. Pemanfaatan sistem informasi desa, basis data terpadu,

serta platform pelayanan berbasis elektronik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara lebih cepat dan akurat (Mardinata et al., 2023). Temuan ini menghasilkan novelty berupa konsep *Digital Transparency Governance*, yaitu tata kelola bantuan sosial yang mengintegrasikan keterbukaan informasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas, akurasi data, dan pengawasan publik.

C. Akuntabilitas dalam Tata Kelola Bantuan Langsung Tunai

Akuntabilitas mencerminkan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan BLT kepada masyarakat. Bentuk akuntabilitas terlihat melalui penyusunan laporan pelaksanaan program, pelaporan penggunaan anggaran, dokumentasi penerima manfaat, serta mekanisme evaluasi program. Kejelasan prosedur dan pertanggungjawaban administrasi menjadi faktor penting dalam menjamin bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat akuntabilitas yang tinggi berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas program dan pencapaian prinsip *good governance*. Sistem

pelaporan yang baik mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat legitimasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan bantuan sosial (Subanda et al., 2025). Pengawasan internal dan eksternal juga memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Perkembangan kajian tata kelola publik menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif. Akuntabilitas modern mencakup kemampuan pemerintah dalam menyediakan bukti kinerja, keterbukaan data, serta respons terhadap aspirasi masyarakat. Konsep *Collaborative Accountability* yang menempatkan pemerintah, masyarakat, lembaga pengawas, dan teknologi digital sebagai aktor yang secara bersama-sama membangun sistem pertanggungjawaban publik yang lebih efektif (Wulandjani et al., 2025).

D. Tantangan Tata Kelola Bantuan Langsung Tunai

Permasalahan data penerima manfaat menjadi tantangan yang paling sering ditemukan dalam berbagai penelitian. Ketidaksesuaian data

kependudukan, keterlambatan pembaruan data, serta munculnya penerima yang tidak memenuhi kriteria menyebabkan efektivitas program sering mengalami hambatan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program BLT.

Kapasitas aparatur pemerintah desa juga menjadi faktor yang memengaruhi kualitas tata kelola BLT (Rivai, 2025). Keterbatasan kompetensi dalam pengelolaan data, administrasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menghambat implementasi transparansi dan akuntabilitas. Tingkat literasi digital yang berbeda antar wilayah turut memengaruhi keberhasilan penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi.

Pengawasan publik yang belum optimal masih menjadi persoalan dalam berbagai daerah. Partisipasi masyarakat sering kali terbatas pada tahap penerimaan bantuan tanpa keterlibatan yang signifikan dalam proses evaluasi dan pengawasan (Setiawan, 2024). Situasi tersebut memperlihatkan perlunya mekanisme yang mampu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan program bantuan sosial.

E. Model Tata Kelola BLT Berbasis Transparansi dan Akuntabilitas (TACTG)

Model konseptual *Transparent and Accountable Cash Transfer Governance* (TACTG), model ini dikembangkan sebagai kontribusi konseptual penelitian untuk menjawab berbagai tantangan tata kelola BLT yang ditemukan dalam (Mahasatya & Baidhowah, 2025). Struktur model terdiri atas enam komponen utama, yaitu transparansi informasi, akuntabilitas administratif, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, pengawasan multiaktor, dan evaluasi berkelanjutan.

Transparansi informasi berfungsi menyediakan akses data yang terbuka kepada masyarakat. Akuntabilitas administratif berfungsi memastikan seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Digitalisasi pelayanan berfungsi meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan distribusi bantuan. Partisipasi masyarakat berfungsi memperkuat legitimasi kebijakan. Pengawasan multiaktor melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan lembaga pengawas. Evaluasi berkelanjutan berfungsi mengidentifikasi kelemahan program untuk mendukung

perbaikan kebijakan secara berkesinambungan.

Model TACTG memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola BLT tidak hanya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel utama. Digitalisasi pelayanan dan partisipasi masyarakat memiliki posisi strategis sebagai faktor penguat yang mampu meningkatkan efektivitas implementasi kedua prinsip tersebut. Kontribusi konseptual ini menjadi novelty utama penelitian karena menawarkan kerangka tata kelola bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, tuntutan keterbukaan informasi, serta kebutuhan pengawasan publik pada era pemerintahan digital (PRATAMA, 2024).

KESIMPULAN

Tata kelola Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan sosial yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan. Transparansi dan akuntabilitas memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan BLT. Transparansi mendorong keterbukaan informasi terkait proses pendataan, penetapan penerima manfaat, penyaluran

bantuan, serta penggunaan anggaran sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meminimalkan potensi penyimpangan (Hakim, 2025). Akuntabilitas memperkuat pertanggungjawaban pemerintah melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang memastikan bantuan disalurkan sesuai dengan tujuan kebijakan dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa implementasi tata kelola BLT masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakakuratan data penerima manfaat, keterbatasan kapasitas aparatur, kesenjangan pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas program dan kualitas pelayanan publik. Perkembangan transformasi digital dalam administrasi pemerintahan menghadirkan peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola melalui pemanfaatan sistem informasi, integrasi basis data, dan penyediaan akses informasi yang lebih terbuka kepada masyarakat. Kehadiran teknologi digital juga memperkuat mekanisme pengawasan

dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif.

Pengembangan model *Transparent and Accountable Cash Transfer Governance* (TACTG) sebagai kerangka konseptual tata kelola BLT yang mengintegrasikan transparansi informasi, akuntabilitas administratif, digitalisasi pelayanan, partisipasi masyarakat, pengawasan multiaktor, dan evaluasi berkelanjutan (Siregar, 2025b). Model tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola BLT tidak hanya bergantung pada keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan teknologi serta keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Integrasi berbagai elemen tersebut berpotensi menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih efektif, adaptif, transparan, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya prinsip good governance di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, M. E., & Purnawati, L. (2025). Negara Kesejahteraan dan Politik Pemenuhan Hak Sosial: Analisis Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Tulungagung. *Journal of Politics and Policy*, 7(2), 137–160.
- Hakim, I. N. (2025). *Analisis Kualitas dan Transparansi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro*.
- Ilma, A. N., Anjari, N. A., Suprpto, F. A., & Prabawati, I. (2026). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN: ANALISIS KETEPATAN SASARAN DI KABUPATEN NGANJUK. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 6(02), 1–13.
- Irawan, E. P., Minarsi, A., Rianty, E., Halim, B., Putri, R. N. I., & Juansa, A. (2025). *Komunikasi pelayanan publik*. Star Digital Publishing.
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58–70.
- Lame, G. (2019). *Systematic literature reviews: An introduction*. 1(1), 1633–1642.
- Mahasatya, M., & Baidhowah, A. R. (2025). *Collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan melalui bantuan sosial di Kecamatan Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan*.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73–81.

- Matin, H. N. A., Darmawan, C., & Bestari, P. (2025). Civic Governance and Good Governance: Dinamika Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. *Integralistik*, 36(1).
- Nightingale, A. (2009). A guide to systematic literature reviews. *Surgery (Oxford)*, 27(9), 381–384.
- Novianti, E., Pratama, M., & Santoso, Y. A. (2026). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Warga Penerima Manfaat di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 184–200.
- PRATAMA, Y. (2024). *AKUNTABILITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA TITIAN RESAK KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU*.
- Putri, F. A., & Khasna, S. (2025). Kepatuhan Prinsip Good Governance dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5(01), 89–112.
- Rahmawati, N. B., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Perspektif Teoretis. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 313–323.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y., & Aiman, L. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.
- Riadi, D. (2026). *Systematic Literature Review Untuk Riset Kesehatan Di Era Artificial Intelligence*.
- Rivai, N. T. E. (2025). Pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan permendagri nomor 113 tahun 2014. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 425–438.
- Riyanto, W. H. (2025). *Model Kelembagaan Daerah dalam Penanganan Kemiskinan*. UMMPress.
- Setiawan, I. (2024). *Pengawasan pemerintahan dalam ulasan teori dan praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.
- Setiawan, I., & Soraya, B. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten. *Jurnal Registratie*, 7(2), 94–110.
- Siregar, P. A. (2025a). *Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan*.
- Siregar, P. A. (2025b). *Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program bantuan langsung tunai dalam mengurangi kemiskinan*.
- Subanda, I. N., Si, M., & Yanthi, N. P. D. (2025). *Inovasi dan Dinamika Bantuan Sosial: Studi Kasus dan Refleksi Kebijakan*. Nilacakra Publishing House.
- Suriadi, H. (2025). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia: Kajian teoretis atas prinsip, tantangan dan strategi implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, 1(1), 42–54.

Widianto, E. D., Mantoro, T., & Nugroho, A. S. (2025). Subject area mapping of Indonesian journals from GARUDA (Garba Rujukan Digital) and SINTA (Science Technology Index) databases: A descriptive study. *Science Editing*, 12(2), 175–182.

Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.